

Analisis Pembangunan Bidang Perpustakaan terhadap Peningkatan Kualitas Manusia dan Penurunan Kemiskinan

Abstrak

Indonesia berpotensi menjadi raksasa ekonomi baru dunia. Peluang ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui bonus demografi 2035. Kunci utama adalah hadirnya masyarakat literat atau berpengetahuan yang dibangun melalui pembudayaan kegemaran membaca melalui perpustakaan. Paradigma baru pengelolaan perpustakaan adalah perpustakaan menjadi ruang interaksi terbuka melalui strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Melalui transformasi ini, akan membangun pemikiran diskursif dan kosmopolitanisme. Yakni, lahirnya pengetahuan praksis sehingga seseorang menjadi terbuka, kritis, kreatif, dan inovatif. Masyarakat yang literat sangat berkorelasi positif terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan dan strategi pembangunan bidang perpustakaan fokus pada: pertama, peningkatan konektivitas infrastruktur perpustakaan; kedua, peningkatan konten atau sumber bacaan terapan/praksis; ketiga, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sebagai pendamping literasi masyarakat, dengan menjadikan budaya literasi indikator pembangunan makro yang diselaraskan melalui rencana pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta menjadikan literasi sebagai gerakan budaya nasional dan penguatan ekosistem literasi dengan konsep “*multi-stakeholder partnerships*”.

Kata Kunci: literasi, masyarakat berpengetahuan, transformasi perpustakaan, inklusi sosial

Abstract

Indonesia has the potency to become world new economy giant. This opportunity is supported by the availability of natural and human resources through demography bonus in 2035. The main key is the presence of literate and knowledgeable society built through reading avidity cultivation by means of library. Library management new paradigm is library as open interaction space through social inclusion-based library transformation strategy. This transformation will establish discursive thinking and cosmopolitanism, namely the birth of practical knowledge so that one can be open-minded, critical, creative, and innovative. Literate society correlates positively towards increase of income and society economy development. Therefore, policy and library development strategy focus on, firstly library infrastructure connectivity improvement; secondly, content or applied/practical reading resources improvement; thirdly, capacity improvement of library personnel as society literacy companion by making literacy culture as macro development indicator harmonised through national, provincial, regency/city and village development plan and making literacy as national culture movement and literacy ecosystem strengthening with multi-stakeholder partnership concept.

Keywords: literacy, knowledgeable society, library transformation, social inclusion

¹ Kepala Bagian Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI

Pendahuluan

Perwujudan Indonesia Emas 2045 bukanlah sebuah slogan. Namun, kebijakan yang agresif dan futuristik. Mengapa? Potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dapat menjadi salah satu negara maju dan raksasa pertumbuhan ekonomi baru dunia. Potensi tersebut dapat ditinjau dari dua perspektif; *pertama*, aspek bonus demografi. Indonesia menjadi negara peringkat keempat terbanyak jumlah penduduk 267 juta posisi ini amat strategis bila dilihat dari bonus demografi 2035 dengan posisi sumber daya manusia 64% usia produktif, disinilah sebuah “ledakan”, atau modal investasi bidang sumber daya manusia yang terjadi satu kali dalam sebuah negara; *kedua*, potensi sumber daya alam. Posisi Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa memiliki anugerah tersendiri. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan alam, beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain. Seperti, emas, gas alam, batubara hingga lautan. Indonesia disebut salah satu negara *megadiverse* yang berada di peringkat kedua untuk hal total spesies endemik, juga sepesis tumbuhan.

Revolusi industri 4.0 dan integrasi ekonomi dunia merupakan tatanan era baru lahirnya keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, modal insani menjadi patu penjurur pembangunan nasional, dimana manusia tidak dapat dilihat dari satu objek pembangunan tapi menjadi investasi (*human capital*). Melalui integrasi antara kualitas manusia dan penguasaan teknologi dan informasi. Manusia dan teknologi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sungguh kemajuan besar dalam era revolusi industri 4.0 menjadikan pengetahuan dan teknologi kunci penggerak ekonomi “*knowledge driven economy*” dan menjadikan dunia menjadi perkampungan kecil “*global village*” yang saling berhubungan serta desrupsi dimana pekerjaan yang sifatnya rutinitas akan digantikan oleh kecerdasan buatan.

Persoalan bangsa saat ini masih kompleks, ditandai dengan capaian indikator makro pembangunan nasional, yakni: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pendapatan per kapita yang masih rendah, pertumbuhan ekonomi masih rendah, dll. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan suatu strategi baru dalam upaya menjawab beberapa persoalan bangsa, yaitu suatu tatanan masyarakat berpengetahuan yang tercermin dalam budaya literasi sebagai hasil proses panjang pendidikan, perlu diwujudkan dalam ikhtiar nasional sehingga terwujud watak kosmopolitanisme yang berfikir terbuka, skeptis,

kritis dan inovatif dalam kehidupannya.

Penguasaan terhadap pengetahuan dan teknologi menjadi pemenang. Secara empiris, teori ini telah terbukti dengan lahirnya perusahaan raksasa baru seperti *Facebook* yang didirikan Mark Zuckerberg dengan kekayaan Rp1.148 Triliun, perusahaan raksasa *e-commerce* terbesar dunia Alibaba Group didirikan oleh Jack Ma dengan kekayaan Rp546,2 triliun (Forbes, 2019), semuanya berbasis teknologi informasi dan ilmu pengetahuan.

Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi amat penting dan strategis dalam menghatarkan Indonesia menjadi negara kuat. Masyarakat literat tersebut dibangun melalui ikhtiar kolektif melalui budaya baca sehingga terbentuk watak kosmopolitanisme sebagai prasyarat masyarakat modern. Melalui membaca seseorang akan mendapatkan informasi (*well-informed*) sehingga terjadi transformasi diskursif yaitu lahirnya pengetahuan praktis sehingga seseorang menjadi terbuka, kritis, kreatif, dan inovatif.

Isu Strategis Pembangunan Perpustakaan

Isu strategis adalah kondisi atau fenomena yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan bidang perpustakaan karena pengaruh atau dampaknya sangat signifikan bagi kemajuan perpustakaan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan perpustakaan dimasa akan datang yang bersifat global dan nasional.

Integrasi Ekonomi Global

Adanya kesepakatan global menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dengan pengembangan dan pemerataan ekonomi di setiap anggota ASEAN. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki empat karakteristik utama: (i) pasar tunggal dan basis produksi; (ii) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (iii) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; serta (iv) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Kondisi ini melahirkan arus pasar bebas dimana setiap negara tidak lagi memiliki batas, arus barang/jasa akan bebas masuk pada setiap negara. Konteks masyarakat seperti ini menjadikan adanya persaingan terbuka sehingga kunci utama adalah ketersediaan SDM yang berkualitas dan penguasaan pengetahuan dan

teknologi, maka Indonesia bukan lagi *base on market* menjadi *base on product*, baik dalam kancah regional maupun internasional.

Revolusi Industri 4.0 dan Perilaku Digital

Revolusi industri mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara *cyberspace* (ruang virtual) dan ruang fisik (ruang nyata). Dalam masyarakat informasi masa lalu, orang akan mengakses layanan *cloud* (database) di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data. Sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), dan hasil analisisnya diumpungkan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk.

Di masyarakat informasi masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Saat ini, manusia, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh *artificial intelligence* melebihi kemampuan manusia diberi *feedback* ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

Revolusi industri menjadikan perubahan perilaku manusia Indonesia ke arah kehidupan digitalisasi. Data Survei APJII 2018 menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia 64,8 persen atau 171,17 jt orang. Maka perpustakaan dipandang perlu melakukan reorientasi strategi layanan dalam menjangring generasi millennial dengan menitik beratkan pada perubahan perilaku terhadap media dan sumber bacaan sebagai segmen pasar yang potensial untuk memanfaatkan perpustakaan.

Bonus Demografi

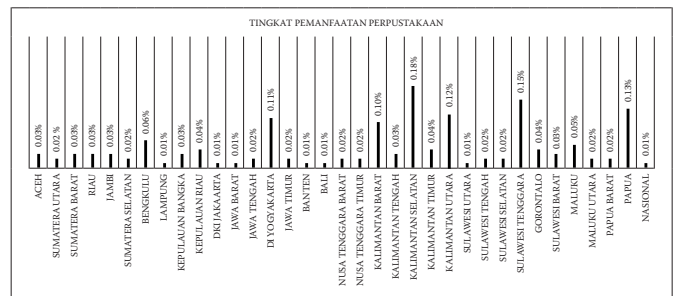
Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020-2035. Pada masa tersebut, jumlah penduduk usia produktif diproyeksi berada pada grafik tertinggi sepanjang

sejarah, mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 297 juta jiwa. Artinya, rasio usia produktif di atas 64 persen sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk melesat menjadi negara maju. Ini adalah rasio usia produktif terbaik Indonesia yang mulai kita nikmati nanti tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2035. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia mampu melakukan konstruksi kualitas manusia melalui budaya literasi, sangat memungkinkan manusia Indonesia menjadi negara produktif sehingga memiliki daya saing yang kompetitif.

Kondisi Faktual Perpustakaan di Indonesia

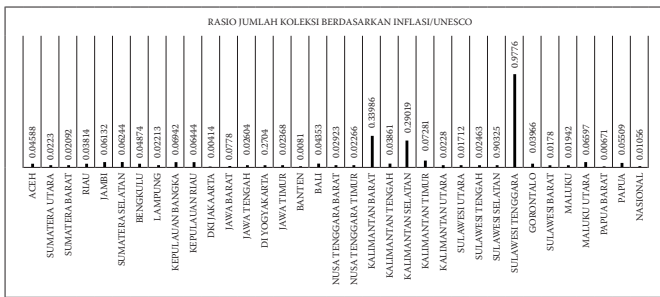
Berdasarkan sensus perpustakaan tahun 2018 oleh Perpustakaan Nasional, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat capaian pertumbuhan pembangunan perpustakaan di Indonesia. Namun, bila kita melihat dari berbagai dimensi kualitas dan kuantitas termasuk pemanfaatan perpustakaan masih belum optimal. Di bawah ini beberapa kondisi faktual perpustakaan.

Pertama, tingkat pemanfaatan perpustakaan. Pemanfaatan potensi perpustakaan yaitu jumlah kunjungan per hari dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangat kecil yaitu sebesar 0,01%. Artinya, belum ideal bila dibandingkan dengan standar IFLA/ UNESCO minimal 2% memanfaatkan perpustakaan.



Grafik 1. Persentasi Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Berdasarkan Provinsi

Kedua, ketersediaan koleksi masih rendah. Belum optimalnya rasio ketersediaan koleksi dengan per kapita penduduk di Indonesia. Rasio ketersediaan koleksi ≥ 0.015 , sementara rasio ideal berdasarkan IFLA/Unesco 1:2.



Grafik 2. Rasio Jumlah Koleksi Berdasarkan Provinsi

Ketiga, kualitas penyelenggaraan perpustakaan rendah. Presentasi perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan baru 19,55%. Artinya, perpustakaan yang ada belum dapat menjadi ruang interaksi publik yang representatif dalam memfasilitas masyarakat sebagai pusat berbagai pengamalan, ruang belajar kontekstual dan ruang peningkatan keterampilan untuk peningkatan kualitas hidup.

Tabel 1. Presentasi Perpustakaan

| No | Jenis | Jumlah Total | Jumlah Ber-SNP | % Ber-SNP |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 1. | Perpustakaan Umum | 42.426 | 7.723 | 18.20 |
| 2. | Perpustakaan Khusus | 3.074 | 424 | 13.79 |
| 3. | Perpustakaan Sekolah/ Madrasah | 117.019 | 23.397 | 19.99 |
| 4. | Perpustakaan Perguruan Tinggi | 164.576 | 627 | 30.48 |
| | Total Perpustakaan | 164.576 | 32.171 | 19.55 |

Kelima, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum masih rendah. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum dengan rasio 1 (satu) orang tenaga perpustakaan melayani 93.634 penduduk Indonesia. Tenaga perpustakaan sebagai fasilitator dan advokator literasi belum dapat menjadi bagian terpenting sebagai subsistem sosial masyarakat dalam pendampingan masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan. Ketercukupan tenaga perpustakaan dinilai belum memenuhi, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, karena dapat dikatakan cukup apabila 1 orang tenaga perpustakaan melayani

maksimal 2.500 penduduk sebagaimana sesuai dengan standar IFLA.

Capaian Kinerja Pembangunan Perpustakaan

Pertama, Peningkatan Infrastruktur dan Indeks Gemar Membaca. Hasil kajian Perpustakaan Nasional RI tahun 2018 perihal budaya baca masyarakat sudah masuk kategori sedang. Nilai budaya baca masyarakat Indonesia tahun 2018 dengan nilai 52,92 dengan kategori budaya baca sedang. Artinya, ada perbaikan bila dibandingkan dengan nilai budaya baca pada tahun 2017 dengan nilai 36,48 dengan kategori budaya baca rendah. Peningkatan kegemaran membaca ini seiring dengan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap regulasi, kelembagaan dan penganggaran pembangunan perpustakaan, sehingga menghantarkan Indonesia menjadi negara peringkat ke-2 terbanyak infrastruktur perpustakaan di dunia setelah India (OCLC, 2017).

Bila tahun 2014 Indonesia menempati urutan 60 dari 61 dalam hal literasi dan membaca, data ini menjelaskan bahwa posisi Indonesia masih masuk kategori rendah. Namun, berdasarkan hasil survei *World Culture Index Score 2018* kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat signifikan. Indonesia menempati urutan ke-17 dari 30 negara. Dalam hal membaca rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu membaca sebanyak 6 jam/minggu, mengalahkan Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Italia, Mexico, Inggris, Brazil, Taiwan, Jepang dengan masing-masing 3 jam per minggu. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia dari hasrat atau minat sudah cukup baik, hanya perlu bagaimana minat ini didorong melalui ketersediaan infrastruktur, konten, dan pendampingan tenaga perpustakaan yang berkualitas. Membaiknya kondisi ini dikarenakan beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan yang sudah berpihak terhadap upaya pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca berupa kerangka kebijakan, regulasi dan pendanaan setiap tahunnya.

Kedua, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menempatkan mandatori pembangunan perpustakaan menjadi mandatorikhusus. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, mengatur secara komprehensif bahwa perpustakaan menjadi satu instrumen negara untuk pencerdasan dan peningkatan keberdayaan bangsa. Sementara, Pasal 5 dalam UU tersebut juga mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai hak

yang sama memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, baik di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, serta memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Selaras dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (2) juga menjelaskan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sementara, kelembagaan perpustakaan daerah juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga terbentuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah berupa Dinas Perpustakaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 34 Dinas Perpustakaan Provinsi dan 491 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota yang semuanya telah dibentuk melalui Peraturan Daerah di masing-masing daerah. Penguatan peraturan perundang-undangan yang berpihak terhadap pembangunan juga menunjukkan kemajuan, ditandai dengan dikeluarkannya Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah diatur kode rekening dan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan Gedung dan kegiatan perpustakaan desa.

Ketiga, Dukungan Politik Anggaran Perpustakaan.

Keberpihakan politik anggaran bidang perpustakaan juga telah mulai meningkat, walaupun secara nasional rasio alokasi anggaran masih sangat rendah bila dibandingkan dengan perkapita penduduk. Berdasarkan alokasi APBN Perpustakaan Nasional tahun 2019, rasio anggaran baru sebesar Rp3.801/perkapita penduduk Indonesia.

Melalui alokasi anggaran ini, tentu tidak terlalu banyak berharap untuk akselerasi pembangunan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakat Indonesia. Walaupun masih ada alokasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta anggaran dana desa (ADD) yang dapat mendukung, namun belum berpihak dan teralokasi dengan baik untuk pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan dan pengembangan buku-buku bacaan masyarakat desa.

Kajian Konseptual Perpustakaan dan Kesejahteraan

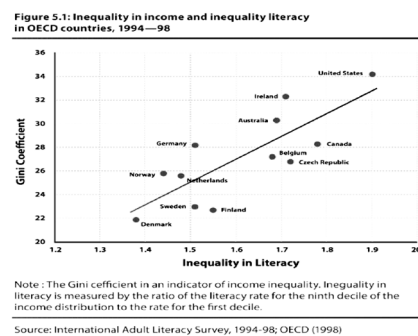
1. Perpustakaan, Literasi dan Kualitas Manusia

Perpustakaan amat berkontribusi dalam membangun masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*). Oleh

karena itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan diperlukan strategi melalui ikhtiar kolektif, sehingga tradisi dan budaya baca di masyarakat dapat terwujud dengan baik. Masyarakat berpengetahuan menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki watak kosmopolitanisme dan berkarakter dalam budaya.

Menurut UNDP dalam *Education for All Global Monitoring Report (2006:144)* menjelaskan hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui literasi. Korelasi kuat antara *gross domestic product* per kapita dengan indikator pembangunan, seperti angka harapan hidup, kematian bayi, hak politik dan sipil, serta beberapa indikator kualitas lingkungan, terutama literasi orang dewasa, yang diartikan dalam indeks pembangunan manusia.

Literasi juga berhubungan dengan kesenjangan ekonomi, seperti ilustrasi untuk 12 negara yang berpartisipasi dalam IALS: semakin besar kesenjangan angka literasi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin berhubungan dengan derajat kesenjangan pendapatan yang tinggi. Fenomena ini dapat merefleksikan pengaruh literasi terhadap kesenjangan, atau mengindikasikan bahwa suatu negara yang ingin memperkecil kesenjangan ekonomi, cenderung mempunyai kebijakan literasi yang lebih kuat, karena literasi dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan.



Gambar 1. Kesenjangan literasi dan pendapatan di negara-negara OECD 1994-1998

Beberapa pengaruh literasi terhadap pembangunan ekonomi, antara lain, sebagai berikut: (i) membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja; (ii) mengasah kepekaan dan tanggung jawab; (iii) mengendalikan laju pertumbuhan penduduk; (iv) mengembangkan metode

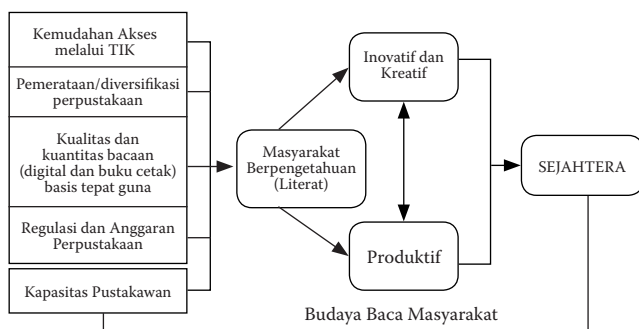
produksi dan distribusi baru yang lebih efisien dan efektif; (v) berkontribusi terhadap peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP); (vi) meningkatkan kemampuan pengalokasian sumber daya secara baik dan bijak; (vii) berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran sehingga inflasi dapat terkontrol; (viii) mengembangkan aneka kecakapan: komunikasi, profesional, dan sosial.

2. Logic Model Pembangunan Perpustakaan untuk Kesejahteraan

Kualitas manusia Indonesia yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi akibat dari rendahnya konektivitas, konten, dan sumber daya manusia itu sendiri. Konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan merupakan integrasi tiga dimensi yakni konektivitas, konten, dan tenaga perpustakaan.

Tesis dari pengaruh terhadap tingginya kemiskinan masyarakat adalah akibat aliterat. Masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumber informasi dan pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidupnya. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya literasi menjadi isu yang sangat penting sebagai proses panjang dari pendidikan. Literasi menghantar seseorang bukan saja mampu dalam menulis dan membaca, tetapi mampu untuk memahami, menganalisis narasi, menginterpretasi dan merefleksikan yang pada akhirnya menciptakan produk/jasa untuk kemaslahatan umat.

Ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan terjangkau, akan mendorong minat dan kebiasaan membaca. Dengan kemampuan membaca ini pula masyarakat akan menjadi kritis, inovatif, dan produktif sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan hidupnya.



Gambar 2. Logic Model Keterkaitan Perpustakaan, Literasi dan Kesejahteraan

Gambar 2 di atas menjelaskan bahwa dampak perpustakaan pada akhirnya adalah masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat. Di sinilah perpustakaan memiliki peran penting sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Perubahan paradigma perpustakaan tidak lagi pendekatan konsep transaksi peminjaman buku, namun berorientasi pada kemanfaatan yaitu perpustakaan menjadi ruang interaksi yang terbuka untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi perpustakaan ini bersifat inklusi baik untuk anak sekolah, pemuda, perempuan, dan juga pelaku usaha mikro/kecil, termasuk juga kelompok marginal lain yaitu penyandang disabilitas sebagai upaya untuk pemberdayaan dan dapat meningkatkan produktivitas.

Perpustakaan dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan dapat terwujud bila adanya budaya membaca. Melalui membaca tidak hanya membangun kognitif, namun juga membangun sensitivitas sosial sehingga melahirkan pemikiran kreatif dan inovatif. Dengan demikian, produktivitas meningkat dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan.

3. Transformasi Perpustakaan Inklusi Sosial

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadikan perpustakaan menjadi ruang interaksi publik. Hal ini mendukung demokrasi perpustakaan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk saling berbagai pengalaman, belajar kontekstual, dan juga pusat belajar. Melalui transformasi perpustakaan, perpustakaan menjadi ruang kegiatan terkait isu pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kohesivitas sosial dan bahkan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, prasyarat utama adalah adanya perilaku gemar membaca masyarakat sebagai budaya kolektif bangsa. Untuk membangun gemar membaca tersebut, ada tiga dimensi yang perlu dikembangkan, yakni: (i) konektivitas berkaitan dengan infrastruktur perpustakaan untuk perluasan layanan sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, (ii) konten berkaitan dengan sumber bacaan atau informasi terapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (iii) sdm berkaitan dengan advokasi dan pendampingan masyarakat.

Terdapat empat perubahan paradigma transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam rangka kesejahteraan masyarakat menjadikan perpustakaan pusat peradaban dan pengetahuan. *Pertama*, pusat ilmu pengetahuan, pusat **kegiatan masyarakat**, dan **kebudayaan**. Perpustakaan umum menjadi pusat

kegiatan belajar dan pusat kegiatan masyarakat. Fungsi ini tentu mendukung fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan formal maka keberlangsungan pendidikannya menjadi ranah perpustakaan. Dalam konteks inilah, transformasi pengetahuan bagi masyarakat agar menjadi individu yang mendapatkan informasi di segala bidang disajikan oleh perpustakaan secara mutakhir melalui sumber-sumber informasi dan literatur serta advokasi tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan sebagai fasilitator pengetahuan. Perpustakaan juga menjadi pusat pelestarian kearifan lokal sebagai unsur kegiatan peradaban masyarakat sehingga terjadi penguatan kohesivitas masyarakat melalui internalisasi kearifan budaya sebagai modal sosial.

Kedua, pusat fasilitasi masyarakat untuk **mengembangkan potensi**. Banyak masyarakat yang tidak dapat keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan dikarenakan tidak ada institusi yang secara demokratis dapat mengembangkan potensi dirinya. Perpustakaan sebagai lembaga publik dalam menjembatani kebutuhan pengetahuan, harus mampu menjadi alternatif solusi bagi masyarakat. Layanan perpustakaan inklusi sosial memberikan ruang bengkel sosial "*social park*" secara gratis dan berkesinambungan yang didukung oleh fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi dan penelitian.

Ketiga, perpustakaan menjadi wadah untuk **menemukan solusi** dari permasalahan kehidupan masyarakat. Ekspansi layanan perpustakaan inklusi sosial adalah lahirnya layanan literasi masyarakat. Layanan ini adalah layanan konsultatif bagi masyarakat di berbagai bidang, baik kesehatan, rumah tangga, politik, dll. Pustakawan subyek spesialis dapat menjadi mentor masyarakat sehingga berbagai persoalan hidup dapat dideteksi dan ditangani secara preventif dan kuratif.

Keempat, perpustakaan dirancang lebih **berdaya guna** bagi masyarakat, perpustakaan tidak lagi pasif tapi lebih proaktif dalam memobilisasi pengetahuan masyarakat. Daya guna yang diberikan perpustakaan kepada masyarakat adalah menjadikan semua potensi perpustakaan dapat didayagunakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perpustakaan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing. Masyarakat ber-

pengetahuan (*knowledge based society*) menjadi kunci dalam era globalisasi saat ini. Mewujudkan masyarakat berpengetahuan adalah tujuan akhir dari budaya literasi, yang menjadi hakikat keberadaan perpustakaan sebagai institusi publik yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan perpustakaan diarahkan pada pembangunan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan termasuk kemajuan kebudayaan sehingga terbangun budaya inovatif dan berdaya saing yang memiliki karakter Indonesiana. Maka dari itu, di bawah ini terdapat beberapa kebijakan dan strategi pembangunan bidang perpustakaan.

Pertama, peningkatan konektivitas infrastruktur literasi. Peningkatan konektivitas ini melalui keterpaduan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang modern berbasis teknologi informasi dan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Hal ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan ilmu pengetahuan dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kedua, peningkatan konten informasi terapan dan tepat guna baik tercetak dan digital, yaitu berkaitan dengan sumber bacaan atau informasi terapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendorong pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui satuan keluarga, pendidikan dan masyarakat. Di samping itu, peningkatan penghimpunan, pengelolaan, dan pelestarian karya cetak dan karya rekam, naskah kuno, serta koleksi budaya etnis nusantara dalam penguatan kebudayaan daerah dan nasional.

Ketiga, pengembangan kapasitas baik kualitas maupun kuantitas tenaga perpustakaan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam upaya peningkatan budaya gemar membaca masyarakat yang melibatkan pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha.

2. Literasi sebagai Isu Nasional

Mencermati masih belum optimalnya dukungan kebijakan dan anggaran daerah perihal pembangunan perpustakaan di daerah, disebabkan beberapa faktor, yaitu: (i) isu perpustakaan atau literasi belum masuk dalam dokumen RPJMD provinsi dan daerah sehingga pembangunan perpustakaan tidak memiliki nomenklatur dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah; (ii) program perpustakaan atau literasi belum dapat menampilkan indikator dampak yang terukur dalam mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik pada

peningkatan kualitas maupun perekonomian rakyat sehingga ketika pembahasan anggaran dengan legislatif dan SKPD perencanaan pembangunan (Bappeda), perpustakaan selalu dianggap menjadi pendukung bukan prioritas.

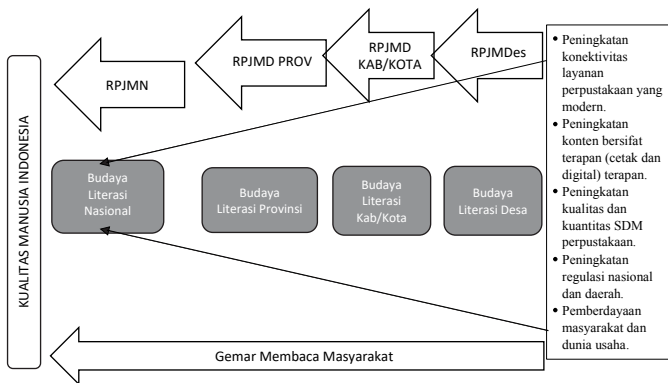
Menurut hemat penulis ada beberapa strategi yang perlu diselaraskan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. **Pertama, Menjadikan Literasi Menjadi Indikator Makro Pembangunan Nasional.** Melalui literasi menjadi indikator makro pembangunan akan membawa dampak yang signifikan termasuk daya tawar akselerasi percepatan pembangunan daerah sehingga gubernur dan bupati/walikota menjadikan literasi sebagai kegiatan strategis dalam peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan.

mendorong lahirnya komunitas-komunitas pegiat literasi dan pendanaan sukarelawan/filantropi yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, penguatan ekosistem literasi dibangun melalui konsep “*multi-stakeholder partnerships*”. Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa, baik pemerintah dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait, dunia usaha (penerbit), industri media cetak dan elektronik, pengarang/penulis, satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat.

Kesimpulan

Pembangunan perpustakaan bertujuan untuk membangun masyarakat literat, sebagai sistem pembangunan nasional dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan (*knowledgeable soceaty*). Isu literasi menjadi isu nasional pembangunan yang perlu diarahkan menjadi indikator makro pembangunan nasional. Artinya, kehadiran perpustakaan bukan saja diukur melalui tingkat penguasaan informasi, tapi pada tingkat pengetahuan atau dampak kehadiran perpustakaan untuk peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan masyarakat.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan inovasi sekaligus strategi nasional pembangunan perpustakaan di Indonesia. Strategi transformasi perpustakaan ini berorientasi pada perspektif pemustaka atau dampak (*outcome*) kehadiran perpustakaan sebagai ruang interaksi publik yang harus hadir sebagai subsistem sosial di masyarakat. Maka dari itu, arah kebijakan dan strategi yang perlu dirumuskan adalah penguatan konektivitas infrastruktur perpustakaan sesuai standar nasional, pengembangan konten baik digital dan cetak berbasis terapan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan sebagai pendampingan literasi, yang dikembangkan pada tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang terintegrasi sebagai sistem pembangunan nasional.



Gambar 3. Keselarasan Indikator Budaya Literasi sebagai Indikator Makro Pembangunan Nasional

Kedua, Gerakan Nasional dan Penguatan Ekosistem Literasi. Literasi sebagai isu nasional memerlukan keterpaduan dan komitmen nasional melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN). Gerakan ini harus tumbuh secara nasional, sistematis, dan terstruktur mulai di pemerintahan desa, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. Keterpaduan gerakan ini akan

Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). *Laporan survei penetrasi dan profil perilaku pengguna internet Indonesia*. Jakarta: APJII
- Bappenas. (2019). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Jakarta: Bappenas.
- Bondar, Adin. (2019). *Membangun literasi untuk kesejahteraan*. (Harian Analisa, 29 April 2019, hlm. 14). Medan: Harian Analisa.
- CCFI. (2018). *Panduan transformasi perpustakaan yang berkelanjutan: dalam mendorong literasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jakarta: Perpuseru.
- Forbes. (2018). *Billionaires: The richest people in the world*: <https://www.forbes.com/billionaires>. (March 5, 2018). USA: Forbes Media LLC, diakses 13 Mei 2019.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Bonus demografi, peluang Indonesia percepat pembangunan ekonomi*. Retrieved from: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bonus-demografi-peluang-indonesia-percepat-pembangunan-ekonomi/>, diakses 15 Mei 2019.
- Perpustakaan Nasional RI. (2018). *Laporan akhir sensus perpustakaan (pemetaan) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2018*. Jakarta: P3MB.
- UNDP. (2017). *Literacy for life: The 2006 Education for All Global Monitoring Report*. London: UNDP